

### **BAB III**

## **DINAMIKA PERKEMBANGAN *TRANS PACIFIC PARTNERSHIP* (TPP)**

Perjanjian TPP merupakan salah satu bentuk kerja sama intensif antara Jepang dan Amerika Serikat yang juga mengikutsertakan keanggotaan dari berbagai negara. Kemitraan ini juga merupakan upaya bersama keduanya untuk menanamkan pengaruh di kawasan Asia Pasifik yang dimobilisasi oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Namun pada hakikatnya perjanjian ini banyak mendapat penolakan baik dari masyarakat domestik keduanya, juga dari negara keanggotaan lainnya.

Oleh sebab itu penjelasan dinamika perkembangan TPP akan diawali dengan sejarah pembentukan TPP, kemudian pengaruh positif keanggotaan Amerika Serikat bagi TPP, lalu respons negatif masyarakat internasional terhadap TPP, dan terakhir adalah status Jepang dan Amerika Serikat dalam TPP tahun 2017 yang dijabarkan melalui tiga tahapan. Tahapan pertama mengenai Amerika Serikat sebagai negara non anggota, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dampak keluarnya Amerika Serikat dari TPP, dan diakhiri dengan Jepang sebagai *leader* dari CPTPP.

#### **A. Sejarah Pembentukan TPP**

Perjanjian Kemitraan Trans Pasifik merupakan sebuah pengembangan dari kerja sama sebelumnya yang bernama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Strategis Trans- Pacific (TPSEP atau P4) ini awalnya di inisiasi oleh lima negara anggota *Asia- Pacific Economic Cooperation* (APEC), yaitu Amerika Serikat, Australia, Singapura, Chili, dan Selandia Baru, pada tahun 1990-an. Pembahasan mengenai urgensi adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*) khusus untuk kawasan Asia Pasifik menjadi topik utama yang dibicarakan oleh kelima negara tersebut di setiap sesi non-formal dalam Forum Ekonomi Kerja Sama Asia Pasifik APEC (Elms, 2012, hlm.1-3).

Namun setelah melewati beberapa perundingan non-formal, Amerika Serikat dan Australia menarik diri sementara dari keinginannya untuk bergabung dalam kesepakatan kerja sama tersebut. Rancangan perjanjian kemitraan dalam hal perdagangan ini kemudian hanya dilanjutkan oleh Singapura, Chili, dan Selandia Baru dari tahun 2002 hingga perundingan akhir pada tahun 2004 dalam sebuah forum negosiasi di Wellington, New Zealand. Dalam forum yang diadakan pada bulan Juli 2004 ini, Brunei Darussalam ikut hadir sebagai negara pengamat, yang setahun kemudian ikut bergabung dan mendeklarasikan kesediaannya menjadi negara pelopor Perjanjian Kemitraan TPSEP, bersama Singapura, Chili, dan Selandia Baru. Deklarasi mengenai Perjanjian Kemitraan TPSEP akhirnya diumumkan pada saat pertemuan menteri perdagangan dalam forum APEC tahun 2005 di Korea Selatan (Elms, 2012, hlm. 5).

Walaupun Perjanjian Kemitraan TPSEP ini memiliki fokus utama pada wilayah Asia Pasifik, namun tidak menutup kemungkinan keanggotaan bagi negara- negara diluar kawasan tersebut. Hal ini jelas tercermin pada keanggotaan empat negara pendiri, dimana Brunei Darussalam dan Singapura merupakan negara yang terletak pada kawasan Asia Tenggara, Selandia Baru mewakili kawasan Pasifik, dan Chili sebagai perwakilan tunggal dari kawasan Amerika Latin. Perjanjian perdagangan bebas kawasan Asia Pasifik ini juga sangat menaruh harapan pada keikutsertaan dari negara- negara anggota APEC dan non-APEC terutama di Asia, dengan menekankan tujuan utama dari kemitraan TPSEP adalah untuk memprioritaskan kepentingan bersama dalam berbagai bidang, diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, teknologi, dan pertanian (Asia Nikkei, 2015).

Dengan menekankan pada kepentingan bersama dan pendekatan hubungan kemitraan, maka TPSEP pada dasarnya mampu menjangkau berbagai sektor kerjasama selain dari pada perjanjian awal, dengan mempertimbangkan kesepakatan dari negara anggota. Sehingga perjanjian TPSEP tidak hanya sekedar sebuah perjanjian yang mengutamakan sektor ekonomi dengan sasaran perdagangan bebas dan investasi

semata, namun juga memiliki prinsip utama untuk tidak menaruh batasan topik kerjasama, agar terdapat penambahan kebermanfaatan bagi semua negara anggota (Asia Nikkei, 2015). Selain memiliki cakupan target keanggotaan kepada seluruh dunia dengan kondisi geografis yang beragam, faktor unik lainnya yang terdapat pada TPSEP adalah menjadikan perjanjian ini sebagai acuan dari perjanjian kerja sama lainnya dalam forum APEC itu sendiri.

Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri dari perjanjian TPSEP jika dibandingkan dengan perjanjian kemitraan lainnya bagi negara anggota APEC, terutama Amerika Serikat. Setelah masa transisi kepemimpinan dari Presiden George W. Bush yang kemudian beralih pada kepemimpinan Presiden Barrack Obama, Amerika Serikat kemudian memutuskan keikutsertaannya sebagai negara anggota TPSEP, namun dengan beberapa pembaharuan dalam regulasi kerja sama, seperti tarif pajak ekspor dan impor, pengaturan hak kekayaan intelektual, serta penekanan terhadap regulasi domestik negara anggota yang dapat berubah mengikuti regulasi utama dalam TPSEP (Gurtov, 2015). Oleh karena perubahan beberapa regulasi, maka TPSEP pun mengalami simpifikasi menjadi Kerja Sama Trans Pasifik (*Trans Pacific Partnership- TPP*) pada tahun 2008.

Perjanjian TPP kemudian mengalami angka pertumbuhan hingga mencapai hampir 40% pada tahun 2014 dikarenakan adanya penambahan anggota dari enam negara lain, yaitu Australia, Peru, Vietnam, Kanada, Meksiko pada tahun 2011 dan disusul oleh Jepang pada tahun 2013 (Gurtov, 2015). Adanya integrasi yang tinggi antara kedua belas anggota TPP, terutama peranan Amerika Serikat beserta koalisinya yaitu Australia dan Jepang, mampu meyakinkan dunia tentang kapasitasnya dalam menciptakan stabilitas kawasan melalui integrasi ekonomi (Takenaka, 2016). Perjanjian perdagangan bebas multilateral ini akhirnya ditandatangani oleh menteri dari 12 negara anggota di Selandia Baru pada tahun 2016 (British Broadcasting Corporation, 2016).

## **B. Pengaruh Positif Keanggotaan Amerika Serikat Bagi TPP**

Sejak tahun 1990-an Amerika Serikat telah mulai memfokuskan kebijakan ekonominya pada kawasan Asia Pasifik yang pertumbuhannya dinilai sangat dinamis. Maka berdirinya APEC merupakan langkah strategis Amerika Serikat yang melihat potensi populasi dunia sebanyak 40%, dengan pertumbuhan GDP mencapai lebih dari 3% pada tahun 2010 di lebih dari tiga perempat negara di kawasan Asia Pasifik (Gurtov, 2015). Terutama sejak terpilihnya Presiden Barrack Obama, TPP menjadi prioritas utama dalam memperluas pasar Amerika Serikat terutama sejak terkena dampak dari krisis global pada tahun 2008 (Spetalnick, 2014). Kapabilitas Amerika Serikat yang memiliki jumlah penduduk dan ekonomi yang jauh lebih besar dari anggota TPSEP lainnya menjadi katalisator bagi kemungkinan keanggotaan negara APEC lain untuk bergabung.

Pada tahun 2011 dalam acara *economy APEC*, Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah memasarkan potensi dan keunggulan TPP jika dibandingkan dengan kemitraan ekonomi regional lainnya (Spetalnick, 2014). Perjanjian TPP mampu menjadi kemitraan terbesar yang relevan dalam mengatasi sejumlah masalah ekonomi global abad ke 21, diantaranya adalah akses pasar komprehensif untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, evaluasi untuk isu- isu perdagangan lintas sektoral seperti keterpaduan regulasi dan daya saing dalam fasilitasi bisnis, serta tantangan perdagangan baru seperti ekonomi digital dan teknologi lingkungan (Gurtov, 2015).

Keanggotaan Amerika Serikat tidak hanya mengubah regulasi dan nama bagi TPSEP, namun juga menjadi magnet bagi negara lain untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan Poros Asia Obama. Dalam pertemuan resmi di kedutaan besar Amerika Serikat, Presiden Barrack Obama menjelaskan kepada para pemimpin dari sebelas negara anggota TPP yang bergabung mengenai prospek usaha untuk meyakinkan beberapa negara besar seperti Jepang dalam pembukaan pasar

di bidang pertanian, akhirnya memasuki tahapan kesepakatan akhir (Spetalnick, 2014). Obama meyakinkan negara anggota untuk melihat dinamisasi kawasan Asia Pasifik sebagai peluang besar dalam menciptakan pertumbuhan lapangan kerja dan ekonomi yang lebih besar, serta menetapkan standar tinggi untuk perdagangan dan investasi di seluruh Asia Pasifik. Lebih jauh Obama menjelaskan tentang adanya potensi kekuatan integrasi yang lebih kuat dalam kemitraan TPP dibandingkan dengan organisasi internasional Uni Eropa (Spetalnick, 2014).

Hingga pada tahun 2015, Amerika Serikat berhasil meyakinkan Australia, Peru, Vietnam, Kanada, Meksiko, dan khusus Jepang pada tahun 2016 untuk ikut mensukseskan TPP yang kemudian beranggotakan 12 negara (Gurtov, 2015). Meskipun pada awalnya TPP didirikan oleh Singapura, Selandia Baru, Chili, dan Brunei Darussalam, namun Amerika Serikat bersama dua negara besar koalisinya yaitu Jepang dan Australia mampu meningkatkan Kemitraan Trans Pasifik menjadi kerja sama perdagangan bebas yang berskala tinggi bagi kemitraan negara- negara anggota, termasuk didalamnya mengatur sejumlah hak cipta dan paten, standardisasi ketenagakerjaan, serta lingkungan (Elms, 2012, hlm. 10). Bergabungnya Jepang menjadikan kemitraan TPP sebagai blok perdagangan bebas yang membentang luas dari Vietnam menuju Chili dan kemudian menjangkau kawasan *Oceania*, dengan cakupan sekitar 800 juta orang dan memenuhi 40 persen dari ekonomi global (British Broadcasting Corporation, 2016).

Perjanjian kemitraan TPP dinilai sebagai paket komplis yang menawarkan solusi dari tiap permasalahan yang relevan di abad 21, dengan sistem perjanjian perdagangan bebas yang bersifat mengikat. Tidak hanya itu, perjanjian TPP juga merupakan resolusi dari sebuah forum kerjasama, karena berisikan negosiasi dari berbagai negara anggota yang memiliki masalah serupa dengan solusi yang tepat untuk semua pihak. Sehingga dalam periode 2013 hingga 2015 merupakan masa promosi TPP kepada dunia, khususnya forum kerja sama APEC, sebagai alternatif perjanjian kemitraan yang

berkembang dan menjanjikan bagi semua negara dengan prinsip keterbukaan (British Broadcasting Corporation, 2016).

### **C. Respons Negatif Masyarakat Internasional Terhadap TPP**

Jika keanggotaan Amerika Serikat dalam TPP menimbulkan efek positif bagi katalisator bergabungnya negara- negara lain, hal ini justru memberikan pengaruh yang bertolak belakang bagi masyarakat internasional. Banyak para tokoh ekonomi domestik yang mencurigai motif bergabungnya Amerika Serikat bukan sebagai resolusi dalam memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi dunia pada abad 21, namun justru hanya menciptakan solusi bagi defisit anggaran dalam negerinya pasca krisis global pada tahun 2008 (Guardian, 2015). Analisa tersebut dilandaskan pada momentum masuknya Amerika Serikat pada tahun 2008 pada saat perumusan regulasi TPSEP. Kemudian TPSEP berubah menjadi TPP dengan regulasi yang serupa dengan kepentingan nasional dan dinilai hanya menguntungkan bagi perekonomian Amerika Serikat, berupa sektor- sektor seperti akses pasar, investasi, lingkungan, hak cipta, dan jasa keuangan (Guardian, 2015).

Penolakan dari berbagai kalangan semakin kuat bahkan berasal dari masyarakat aliansi terbesar TPP, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Setelah penandatanganan TPP oleh 12 menteri negara anggota di Selandia Baru, masyarakat Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar- besaran di Auckland Harbour Bridge (British Broadcasting Corporation, 2016). Mereka menuntut pemerintah Barrack Obama untuk tidak hanya mementingkan perusahaan besar dan investor asing, tetapi juga mempertimbangkan kondisi bagi para pekerja lokal. Kemitraan TPP dianggap akan mengganggu stabilitas ketenagakerjaan lokal dikarenakan akan banyak sekali persaingan dengan negara berkembang.

Begitu juga dengan keadaan domestik Jepang yang tidak stabil dikarenakan mayoritas masyarakat, terutama berasal dari kelompok petani mulai mengkhawatirkan

keberlangsungan pasar produk lokal, terutama dalam sektor agrikultur. Masyarakat terus mendesak pemerintah untuk mengadakan proteksi dan memberikan subsidi khusus untuk sektor pertanian agar kualitas produk lokal terjamin kualitasnya dan tidak perlu mengimpor terlalu banyak bahan pangan dari luar (Voice of America, 2015). Pihak oposisi partai *Liberal Democratic Party* (LDP), yang meraih kemenangan dari sebagian besar suara petani juga menentang bergabungnya Jepang dalam TPP. Hal ini dikarenakan beban sosial yang dirasakan kubu oposisi dalam menjaga amanah suara rakyat dalam pemilihan selanjutnya (Voice of America, 2015).

Kepercayaan internasional terhadap efektifitas TPP juga semakin memburuk dikarenakan regulasi yang tidak transparan terutama dalam ketenagakerjaan lokal dan hanya menggambarkan keuntungan yang akan didapat tanpa transparansi perhitungan profit yang didapat. Kritik dari para akademisi dan ekonom domestik di berbagai negara semakin masif setelah dokumen perjanjian TPP di terbitkan oleh wikileaks pada tahun 2015. Kritik terbesar terhadap TPP adalah bentuk perjanjian itu sendiri yang mengandung tiga unsur kuat praktik neoliberalisme, yaitu perdagangan bebas barang dan jasa, sirkulasi bebas kapital, serta kebebasan dalam berinvestasi (Guardian, 2015). Opini publik mengenai buruknya reputasi TPP terutama dalam pengaturan hak kekayaan intelektual, ketenagakerjaan dan lingkungan yang dinilai hanya menguntungkan korporasi besar sudah banyak beredar baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Kondisi TPP semakin tidak stabil dengan adanya isu memanfaatkan bisnis dengan mengorbankan kepentingan publik, yang memposisikan investor dari berbagai korporasi besar di atas kepentingan masyarakat dan negara (Guardian, 2015).

#### **D. Status Jepang dan Amerika Serikat dalam TPP Tahun 2017**

Amerika Serikat memang bukanlah negara inisiator dalam pembentukan TPSEP namun ia mampu menjadi katalisator bagi perubahan perumusan TPP dan bahkan menarik keanggotaan negara APEC lainnya untuk bergabung dalam kemitraan TPP. Namun keberhasilan Amerika Serikat dalam merumuskan dan meningkatkan nilai jual TPP memakan waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan keberhasilan politik dalam negeri untuk meyakinkan Kongres dalam meratifikasi TPP. Sehingga pada tahun 2017, dimana terjadi pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan Amerika Serikat yang menimbulkan dinamika baru bagi perkembangan Perjanjian TPP, yakni status non anggota Amerika Serikat dibawah kebijakan proteksionisme Presiden Donald Trump, dampak keluarnya Amerika Serikat dari TPP, dan inisiatif Jepang untuk menjadi *leader* dalam perekonstruksian Perjanjian TPP menjadi CPTPP.

##### **1. Amerika Serikat sebagai Negara Non Anggota**

Pada tahun 2017 dengan terpilihnya Presiden Donald Trump sebagai pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan Amerika Serikat yang baru, kebijakan pertama yang dilakukannya adalah penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari TPP. Kebijakan ekonomi tersebut didasari oleh kebijakan baru, yaitu *America first*, dimana kemitraan yang berbasis multilateral dengan negara lain akan sangat sulit diwujudkan dibandingkan dengan kerjasama bilateral (British Broadcasting Corporation, 2017). Kebijakan *America first* juga diberlakukan kepada semua jenis kemitraan bilateral dengan negara lain, yang harus mencantumkan pertimbangan terhadap kepentingan dan kemakmuran para pekerja lokal Amerika Serikat.

Presiden Donald Trump menilai Perjanjian TPP akan merugikan sektor manufaktur dan berbagai pengusaha kecil dan menengah Amerika Serikat. Ia beranggapan kemitraan dalam TPP akan semakin memperbesar kemungkinan para

perusahaan Amerika Serikat yang memiliki kapabilitas tinggi di dalam negeri justru melirik potensi investasi dan profit di luar dengan berbagai kemudahan kapasitas yang menjanjikan (Cable News Network, 2017). Hal ini akan sangat merugikan perekonomian Amerika Serikat dan juga kelayakan para pekerja lokal yang harus bersaing dengan ribuan tenaga kerja asing dari negara berkembang. Trump juga memberlakukan pajak tinggi bagi sejumlah produk asing yang masuk dalam pasar lokal Amerika Serikat (Vaswani, 2016). Kebijakan Trump dinilai sangat pro tenaga kerja lokal sehingga sangat mendapat dukungan penuh dari Kongres.

## **2. Dampak Keluarnya Amerika Serikat dari TPP**

Proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat, yang dulu berperan sebagai penggerak utama dalam liberalisasi perdagangan global negara- negara di kawasan Asia Pasifik, secara signifikan menurunkan persentase keuntungan dari negara- negara anggota serta menutup kemungkinan adanya keikutsertaan negara- negara Asia, seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan, dalam keanggotaan TPP (Sposato, 2017). Peran Amerika Serikat yang begitu besar dalam Perjanjian Kemitraan TPP didasarkan pada kekuataannya dalam membangun pembukaan pasar yang didasari pada reformasi sektor ekonomi. Perjanjian Kemitraan TPP memberikan ruang lebih luas berupa akses perdagangan kepada negara- negara berkembang terhadap pasar Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Bahkan Perdana Menteri Shinzo Abe mengakui akan ada penurunan angka dalam target TPP sejak keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan, begitu juga dengan angka antusiasme negara- negara di Asia untuk bergabung (Takenaka, 2016).

Kemudian pengaruh lainnya yang dapat dirasakan langsung dari keluarnya Amerika Serikat dari TPP adalah kekecewaan dari para pemimpin negara anggota, terutama Perdana Menteri Shinzo Abe. Perdana Menteri Shinzo Abe yang sudah meratifikasi kemitraan tersebut pada Desember 2016, mengatakan dalam jumpa pers nya bahwa TPP akan

mengalami penurunan pamor jika Amerika Serikat meninggalkan perjanjian TPP yang sudah sejak masa kepemimpinan Presiden Barrack Obama terus mendapat perhatian dunia (Takenaka, 2016). Bahkan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggambarkan kekecewaannya melalui penggambaran pernikahan dimana mempelai pria tidak kunjung datang dan kemudian pernikahan dibatalkan secara sepihak (Vaswani, 2016).

Menurut sebuah studi di Institut Petersen, dampak negatif dari keluarnya Amerika Serikat adalah menurunnya potensi keuntungan yang akan didapat negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam keanggotaan TPP terkait strategi mereka untuk meningkatkan perekonomian negara (Vaswani, 2016). Negara pertama yang paling dirugikan adalah Singapura sebagai salah satu pelopor pembentukan TPSEP dan merupakan pendukung terbesar dari kemitraan ini. Singapura sangat bergantung pada sektor perdagangan dan investasi dari luar negeri, dimana terdapat pembangunan salah satu pelabuhan terbesar dalam kawasan Asia Tenggara. Sehingga kemitraan TPP nantinya akan menjadikannya sebagai pusat dari peningkatan pelayanan seperti pengiriman dan pembiayaan perdagangan melalui *trade mark* perdagangan regional dan global yang mampu diciptakan oleh TPP (Vaswani, 2016).

Negara kedua Asia Tenggara yang juga menaruh harapan besar dengan TPP adalah Malaysia. Menurut studi Institut Petersen tersebut, Malaysia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya hingga 5,5% dikarenakan potensi peningkatan ekspor minyak kelapa sawit kepada Amerika Serikat yang melalui TPP akan diberikan akses yang lebih besar (Vaswani, 2016). Walaupun pengaruh dari akses yang lebih besar tersebut adalah tanggung jawab Malaysia untuk menjamin perusahaan kelapa sawitnya sesuai dengan aturan internasional mengenai standar ketenagakerjaan dan kelestarian lingkungan yang tinggi.

Ketiga adalah negara Vietnam yang menurut studi Petersen merupakan negara yang akan mendapat pengaruh terbesar terhadap kemitraan TPP. Vietnam merupakan negara

yang relatif tertutup sebelumnya dan tidak terlalu banyak membuka diri terhadap kerja sama multilateral (Vaswani, 2016). Akan tetapi melalui kemitraan TPP, Vietnam akan mendapatkan akses lebih besar untuk perdagangan beras, makanan laut, tekstil, serta barang-barang manufaktur yang memiliki nilai tambah (Vaswani, 2016). Lebih jauh lagi para pakar ekonomi domestik melihat kemungkinan pertumbuhan ekonomi mencapai 10% pada tahun 2025 melalui kemitraan TPP.

Sedangkan dampak terhadap internasional secara keseluruhan adalah pandangan yang semakin negatif terhadap perjanjian TPP, setelah keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan dengan alasan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Masyarakat internasional dari sebelas negara anggota yang tersisa semakin mendesak pemerintahnya untuk mengikuti langkah Presiden Donald Trump. Perjanjian TPP menurut pandangan mereka hanyalah menguntungkan kalangan pebisnis besar kapitalis (Voice of America, 2015). Perjanjian TPP dianggap hanya merupakan alat pebisnis ibesar internasional untuk dapat beroperasi di pasar-pasar negara berkembang (Voice of America, 2015).

### **3. Jepang sebagai *Leader Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP)***

Namun keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan serta polemik opini publik yang berkembang mengenai buruknya sistem Kemitraan Trans Pasifik tidak mengubah niat Jepang, untuk tetap menaruh kepercayaan yang besar bagi potensi kerjasama yang diawali oleh perjanjian dagang awal Kemitraan Ekonomi Strategis Trans-Pasifik. Jepang melihat adanya potensi besar bagi kemitraan TPP yang mengakomodasi integrasi ekonomi untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Asia Pasifik. Di bawah perumusan baru TPP, Jepang meyakini akan adanya pembangunan bingkai keamanan multilateral untuk memperkuat nilai aliansi Asia Pasifik. Sehingga kemitraan TPP yang baru tidak hanya

menjadi alternatif baru untuk perekonomian kawasan semata, tapi juga potensi pembangunan integrasi dalam sektor keamanan dan pertahanan (Sposato, 2017). Selain itu, Jepang juga melihat adanya kemungkinan China untuk bergabung dengan TPP yang juga akan memberikan arti strategis baru pertumbuhan rezim neoliberal yang sedang menjadi program unggulan China (Voice of America, 2015).

Jepang kemudian menginisiasi pertemuan dengan sebelas negara anggota TPP pada pertemuan KTT APEC Vietnam pada November 2017, sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Jepang atas keputusannya meratifikasi Perjanjian TPP pada tahun 2016 (Sposato, 2017). Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk melanjutkan TPP tanpa keikutsertaan Amerika Serikat dengan merumuskan regulasi- regulasi baru agar mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional. Perumusan perjanjian baru TPP diadakan di Tokyo pada tanggal 23 Januari 2018 dengan menetapkan evaluasi baru dari perjanjian kemitraan regional berbasis ekonomi TPP ini menjadi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP)*, dengan meyakinkan pemerintah Australia dan Kanada (Funabashi, 2018).

Perumusan baru ini akhirnya ditandatangani oleh sepuluh negara anggota lainnya pada Maret 2018 di Santiago, dengan penambahan pasal yang mempertimbangkan pengajuan hak personal dari tiap perusahaan dalam negara-negara anggota untuk mengatur dan menentukan kebijakan secara mandiri (Mulgan, 2017). Kemitraan CPTPP juga mencakup regulasi baru yang lebih transparan dibandingkan dengan TPP dalam bidang ketenagakerjaan, lingkungan, dan penghapusan terhadap hambatan tarif dan non tarif, sehingga kedepannya diharapkan mampu mengurangi kecurigaan masyarakat internasional.

Selain mengantisipasi penolakan dari masyarakat domestik, perumusan CPTPP yang bersifat lebih kooperatif terhadap keinginan negara- negara anggota terutama dalam kebijakan hak personal perusahaan, diperkirakan akan mampu menarik beberapa negara di Asia terutama Thailand,

Indonesia, dan Korea Selatan. Perdana Menteri Shinzo Abe yakin rencana keikutsertaan ketiga negara tersebut dalam CPTPP akan direalisasikan mengingat faktor pendapatan riil ketiganya akan meningkat secara signifikan setelah bergabung dengan pakta ini, dimana berisi akses yang besar bagi perdagangan dengan negara- negara yang memiliki basis perdagangan yang kuat (Sposato, 2017).